



Home > Forum Dosen > Jangan Terjebak Bolu Ketan

Forum Dosen

Jangan Terjebak Bolu Ketan

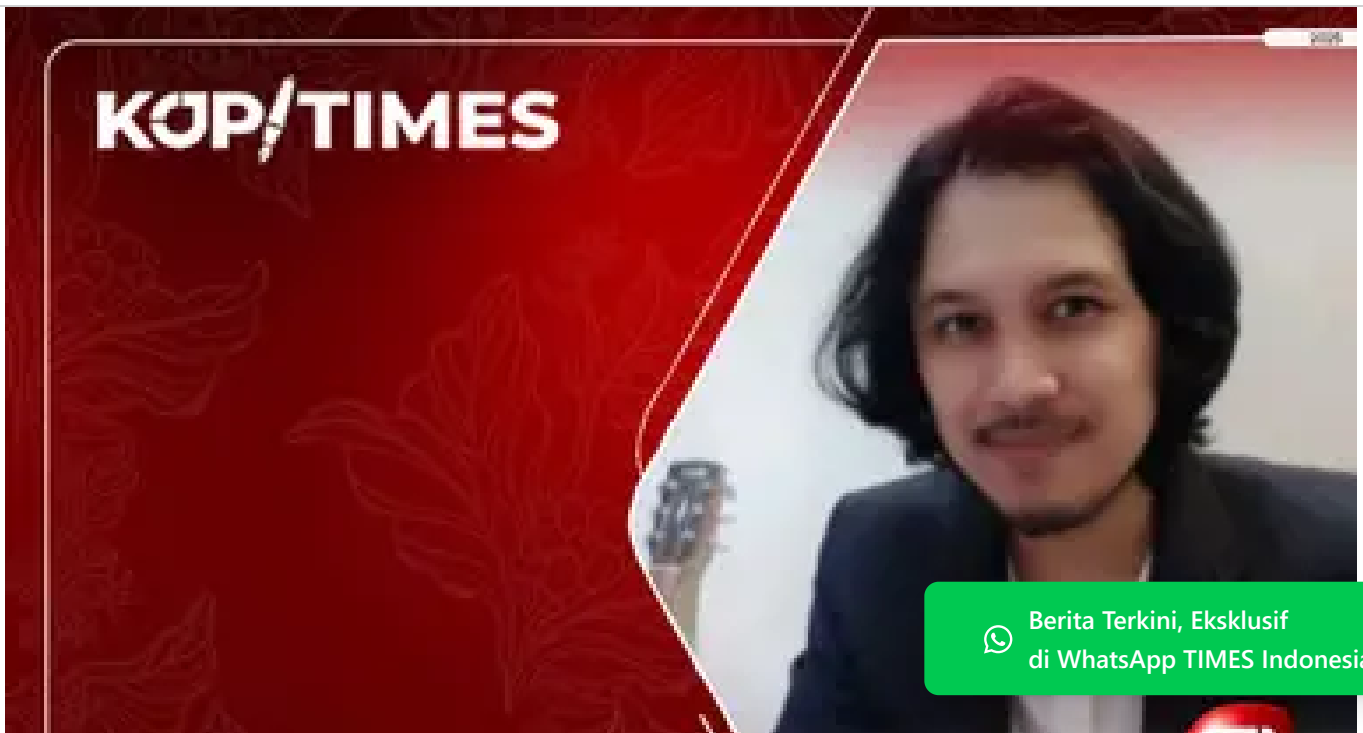
Demokrasi tidak rusak karena rakyat tertawa. Demokrasi rusak ketika tawa menghabiskan seluruh energi publik hingga lupa membaca isi kekuasaan.

TIMES Indonesia, 26 Mei 2026, 13:26 WIB

5.6k



Hainorrahman, Rochmat Shobirin



Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia

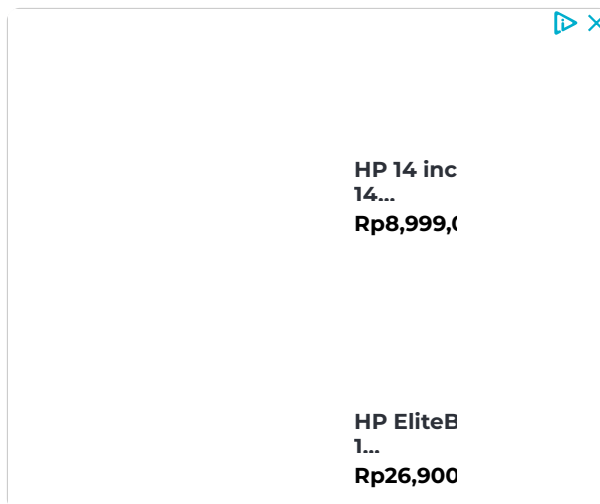
A-

A

A+

SLEMAN – Lagu “My Little Bolu Ketan” terdengar ringan, lucu, dan mudah menempel di kepala. Ia lahir dari potongan wawancara pejabat, dipelintir menjadi meme, lalu disebar algoritma menjadi hiburan massal. Publik tertawa, TikTok bergerak cepat, dan percakapan politik kembali dipenuhi potongan-potongan lucu yang gampang dibagikan. Sekilas tampak sepele, tetapi justru di situlah masalahnya. Politik hari ini makin sering berubah menjadi industri hiburan.

Kita sebenarnya pernah berkali-kali jatuh ke lubang yang sama. Dalam berbagai momentum politik sebelumnya, publik terlalu sibuk membahas gaya bicara, joget, ekspresi wajah, pakaian, hingga persona “gemoy” seorang figur, sementara pembicaraan tentang kebijakan justru tertinggal jauh. Netizen merasa sedang aktif berpolitik karena ikut membuat meme, padahal yang diperbincangkan hanya permukaan visual.



Politik akhirnya dinilai seperti konten hiburan: siapa paling lucu, paling santai, paling dekat dengan kamera, atau paling mudah dijadikan bahan candaan. Akibatnya, daya kritis masyarakat perlahan bergeser dari analisis menuju konsumsi hiburan.

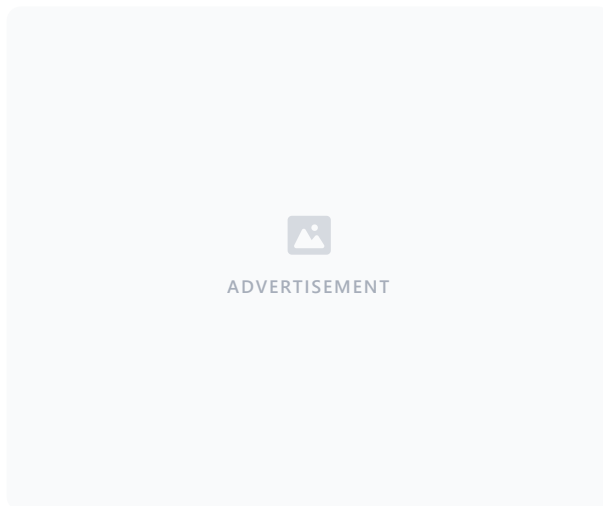
Kesalahan besar netizen dalam politik digital adalah mengira viralitas sama dengan kesadaran politik. Padahal algoritma media sosial tidak dirancang untuk memperdalam pemikiran publik, melainkan mempertahankan perhatian selama mungkin.

Konten yang lucu, emosional, dan personal jauh lebih mudah disebar dibandingkan pembahasan tentang tata kelola energi, konflik kepentingan, atau dampak kebijakan ekonomi. Banyak orang cenderung diarahkan untuk menikmati politik, bukan memeriksanya. Yang ramai b



Dalam konteks Bahlil Lahadalia, misalnya, publik lebih sibuk mengulang istilah “bolu ketan” daripada membicarakan secara serius persoalan energi, tambang, hilirisasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Padahal jabatan strategis semacam itu menentukan arah ekonomi nasional dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Yang seharusnya diuji publik adalah transparansi kebijakan, relasi kuasa dengan korporasi, serta keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat. Namun semua itu kalah menarik dibanding potongan video lucu berdurasi beberapa detik. Politik pun direduksi menjadi hiburan singkat yang cepat dikonsumsi lalu dilupakan.



Fenomena serupa terlihat dalam pembicaraan tentang Teddy. Banyak komentar publik justru berkisar pada gestur tubuh, gaya berdiri, ekspresi wajah, atau kedekatannya dengan presiden. Sekilas tampak kritis, tetapi sebenarnya kritik semacam itu sangat mudah dipatahkan. Ketika ruang publik dipenuhi ejekan personal, substansi langsung kabur. Yang hilang justru pertanyaan penting tentang bagaimana kekuasaan bekerja di sekitar pusat pemerintahan.

Padahal kritik substantif seharusnya bergerak lebih jauh. Publik perlu bertanya bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dibentuk, bagaimana pengaruh politik bekerja di lingkaran kekuasaan, sejauh mana transparansi dijalankan, dan apakah ada konsentrasi pengaruh tertentu yang perlu diawasi.

BACA JUGA



[Bahasa Komando](#)

Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada memperdebatkan m...
seorang pejabat. Namun politik digital memang lebih menyukai sesuatu yang visual dan emosional.



Berita Terkini, Eksklusif
di WhatsApp TIMES Indonesia

menembunyi, atau fokus pada kerja nyata. Seketika arah percakapan berubah. Publik tampak seperti sekumpulan pembenci personal, bukan warga yang sedang menjalankan kontrol demokrasi. Kekuasaan akhirnya lolos dari pemeriksaan yang lebih mendalam.

Kesalahan seperti ini pernah berulang dalam banyak kasus politik Indonesia. Publik mudah terpancing pada simbol dan drama personal, tetapi cepat lelah ketika harus membaca data, memahami regulasi, atau mengikuti detail kebijakan.

Banyak pejabat akhirnya sadar bahwa citra lebih efektif daripada argumentasi. Cukup tampil santai, lucu, atau dekat dengan rakyat, maka sebagian kritik akan berubah menjadi fanatisme atau sekadar candaan. Politik tidak lagi bekerja melalui gagasan, melainkan melalui pengelolaan persepsi.

BACA JUGA



[Kampus Swasta Bukan Anak Tiri Pendidikan](#)

Karena itu masyarakat perlu lebih disiplin menjaga arah kritik. Humor boleh ada. Meme boleh hidup. Lagu viral boleh dinikmati. Tetapi setelah tertawa, publik harus kembali bertanya: kebijakan apa yang sedang dijalankan? siapa yang diuntungkan? siapa yang dirugikan? bagaimana negara mempertanggungjawabkannya? Demokrasi membutuhkan warga yang mampu memisahkan hiburan dari pengawasan kekuasaan.

Demokrasi tidak rusak karena rakyat tertawa. Demokrasi rusak ketika tawa menghabiskan seluruh energi publik hingga lupa membaca isi kekuasaan. Jika masyarakat terus terpancing pada persona, gestur, dan kemasan visual, maka politik akan berubah menjadi panggung hiburan tanpa pengawasan substantif. Dan ketika itu terjadi, kekuasaan tidak perlu repot membantah kritik kebijakan. Cukup arahkan perhatian publik pada hal-hal remeh, lalu biarkan rakyat sendiri kehilangan fokus.

**) Oleh : Apri Damai Sagita Krissandi, Dosen Universitas Sanata Dharma.*

**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id*

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.*

**) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon ya*



Berita Terkini, Eksklusif
di WhatsApp TIMES Indonesia

Klik **Channel TIMES Indonesia**

Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Apri Damai Sagita Krissandi Kopi Times Opini Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Edisi Rabu, 27 Mei 2026: E-Koran, Bacaan Positif Masyarakat 5.0



Edisi Rabu, 27 Mei 2026

Edisi Rabu, 27 Mei 2026

Edisi Selasa, 26 Mei 2026

Edisi Selasa, 26 Mei 2026

Edisi Senin, 25 Mei 2026

Lihat Edisi Selengkapnya →

OLAHRAGA >



EKONOMI >





Singapore Open 2026: Bangkit dari Tekanan, Fajar/Fikri Amankan Tiket Babak 16 Besar
13 jam yang lalu



Rupiah Tembus Rp17.800, Menkeu Purbaya Klaim APBN Tetap Aman
11 jam yang lalu



Luis de la Fuente Ungkap Formula Spanyol Menuju Misi Juara Dunia 2026
19 jam yang lalu



Target Pajak Mamin Kabupaten Malang Tembus Rp20 Miliar, Realisasi Hampir 50...
1 hari yang lalu



Pochettino Umumkan Skuad AS Piala Dunia 2026, Pemain Sempat Diliputi Cemas
1 hari yang lalu



Investor Pasar Modal di Malang Raya Tumbuh 56 Persen, OJK Catat Lonjakan SID hingga 47...
1 hari yang lalu

LIPUTAN KHUSUS >



Kala Seragam Loreng Menjadi Asa Baru Warga Slempit Gresik
6 hari yang lalu



Lorong Gelap Pembubaran PT Kigumas: Belasan Tahun Modal APBD Kabupaten Mala...
20 Mei 2026



Warga 3 Desa di Wagir Malang Bertahun-tahun Terdampak TPA Supit Urang, Janji...
13 Mei 2026



Alun-alun Kepanjen Malang Dikebut di Tengah Efisiensi Anggaran, PusDek Soroti Tata Ruang...
8 Mei 2026



Berita Terkini, Eksklusif
di WhatsApp TIMES Indonesia

Portal berita positif yang menyajikan informasi terkini tentang peristiwa, cek fakta, ekoran, politik, entertainment, kuliner, gaya hidup, wisata, dan kopi times

Ikuti Kami



Kontak Kami

- Jl. Besar Ijen No.90, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116
- (0341) 563566
- redaksi@timesindonesia.co.id

- Nasional
- Internasional
- Politik
- Ekonomi
- Olahraga
- Entertainment

Berlangganan

Dapatkan berita terbaru langsung di inbox Anda

Berlangganan

Member Of



SUPPORTED BY



Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia